

BAB I

PENDAHULUAN

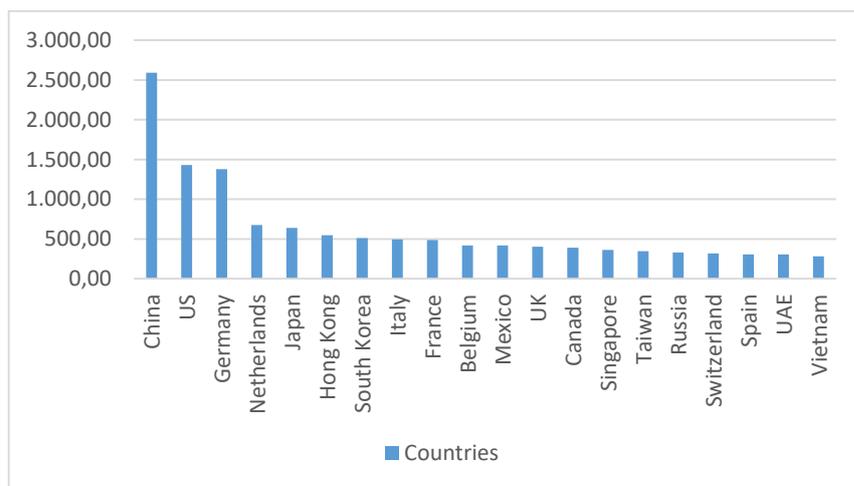
1.1 Latar Belakang

Era globalisasi di abad 21, setiap negara perlu menjalankan sistem perekonomian yang terbuka dengan negara lain dengan cara membuka diri dalam perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan perlunya penghubung perekonomian di antara negara satu dengan negara lainnya yang mana keterbukaan tersebut disebabkan oleh kemampuan setiap negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri akibat adanya interdependensi ekonomi yang semakin kuat. Maka dari itu, sebuah negara perlu memikirkan perkembangan perekonomian negaranya dengan memanfaatkan hubungan antar-negara dalam meningkatkan perekonomian negaranya. Dengan meningkatkan pertumbuhan perekonomian, diharapkan hal tersebut dapat memperlancar pembangunan ekonomi di negara tersebut serta memberikan keuntungan dengan tersedianya pasar yang luas untuk kebutuhan ekspor dan impor. Hal ini lumrah terjadi di semua negara demi kepentingan negaranya, sehingga adanya pemanfaatan hubungan antar-negara oleh suatu negara dapat membuat pertumbuhan ekonomi negara bisa meningkat (Asbiantari, Hutagaol, & Asmara, 2016). Salah satu contohnya adalah hubungan antara negara-negara di Eropa dan Republik Rakyat Tiongkok.

Pada dasarnya pemanfaatan hubungan antar-negara oleh suatu negara secara tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan GDP negara tersebut dengan melakukan adanya pembangunan, ekspor, dan impor. Hal ini tentu sejalan dengan tujuan setiap negara yang tentunya ingin mendapatkan pertumbuhan ekonomi

secara positif. Dalam teori klasik yang digagas oleh Adam Smith, dijelaskan dua aspek penentu dalam pertumbuhan ekonomi. Aspek pertama adalah pertumbuhan *output* GDP total dari negara tersebut. Sedangkan aspek kedua adalah pertumbuhan penduduk dari negara tersebut (Smith, 1776).

Tiongkok ialah salah satu negara yang pertumbuhannya berjalan dengan pesat dibandingkan dengan negara lainnya di dunia. Pertumbuhan yang signifikan tersebut diakibatkan oleh produksi barang – barang murah dari Tiongkok yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di Tiongkok. Hal tersebut membuat Tiongkok menjadi negara dengan pengekspor barang-barang terbesar di dunia (Lin, 2015, p. 142).



Grafik 1.1 Negara Dengan Pengekspor Terbesar Di Dunia Tahun 2020

(Dalam Milliar US\$)

Sumber: (Statista, 2021)

Dari grafik diatas menjelaskan bahwa, Tiongkok merupakan negara dengan eksportir terbesar di dunia. Tercatat bahwa pada tahun 2017, Tiongkok mengekspor barang dan jasa senilai \$2,16 triliun, ini terdiri sekitar 19,6% dari total PDB China tahun itu dan pada tahun 2018, ekspor China menyumbang sekitar 12,9% dari total global (World Population Review, 2021). Meskipun demikian, aktivitas ekspor barang-barang tersebut tidak terlepas dari pemanfaatan limbah bahan baku industri yang diimpor dari beberapa negara yang kemudian diolah menjadi produk baru. Limbah bahan baku industri tersebut didapatkan dari perusahaan – perusahaan yang berpusat di Amerika dan Eropa (VOA, 2019; Joyce, 2019). Limbah tersebut merupakan bahan baku industri seperti, limbah kertas, kapas, wol , tekstil, dan plastik

Kebijakan Tiongkok untuk melakukan impor limbah bahan baku industri tersebut tidak terlepas dari adanya sektor manufaktur yang berkembang dengan pesat. Selain itu, sektor bisnis menganggap ini sangat menguntungkan dikarenakan negara yang mengekspor membiayai pengiriman limbah bahan baku ke Tiongkok (Nugraha, 2019). Kebijakan impor limbah tersebut tentunya memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian Tiongkok. Tiongkok sendiri sejak tahun 1990 hingga 2016 merupakan salah satu negara dengan pengimpor limbah bahan baku daur ulang di mana dalam rentang waktu tersebut, angka impor limbah yang dilakukan Tiongkok meningkat sepuluh kali lipat dari yang sebelumnya hanya berjumlah 4,5 juta ton menjadi 45 juta ton (Ritchie, 2018, p. 5). Jumlah limbah yang diekspor ke Tiongkok tersebut telah “mewakili” 50 persen limbah bahan daur ulang di dunia (Schauenberg, 2019). Terdapat korelasi antara impor limbah yang dilakukan Tiongkok dengan keuntungan yang diraihinya. Semakin besar impor

limbah bahan baku yang dikirim oleh Tiongkok, maka akan semakin besar juga keuntungan yang didapatkan oleh Tiongkok. Tercatat bahwa dari tahun 1988 – 2016, nilai perdagangan akibat melakukan impor yang dilakukan oleh Tiongkok sebesar 57,6 juta US\$ (Brooks, Wang, & Jambeck, 2018). Tahun 2014, impor di Tiongkok meningkat sebesar 0,4 persen (MENAFN, 2015). Sehingga Peningkatan tersebut tentunya sangat membantu dalam peningkatan perekonomian di Tiongkok.

Namun, kebijakan yang membawa keuntungan besar bagi Tiongkok tersebut dihentikan pada tahun 2018. Pada tanggal 1 Januari 2018, Pemerintah Tiongkok secara resmi mengeluarkan kebijakan pelarangan impor yang dinamakan *National Sword China Policy*. Kebijakan tersebut ialah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok guna melarang impor limbah bahan baku industri dari berbagai negara. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tiongkok tersebut membuat sektor perdagangan impor limbah bahan baku daur ulang di seluruh dunia terguncang dan kebingungan, khususnya negara - negara yang mengekspor limbah bahan baku daur ulangnya ke Tiongkok seperti Amerika Serikat yang merupakan negara dengan pengekspor limbah bahan baku paling banyak dengan jumlah limbah yang hampir mencapai 700.000 ton per tahun. Hal tersebut menyebabkan adanya penurunan impor bahan daur ulang dari negara maju secara drastis di Tiongkok. Hal ini tentu menjadi anomali atau fenomena ekonomi di mana Pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan yang dapat mengancam kerugian ekonomi bagi Tiongkok sebesar miliaran dollar dan dapat menyebabkan pabrik industri daur ulang terancam tutup (The Economist, 2017). Hal ini disebabkan dengan adanya larangan berbagai jenis limbah tertentu akan menyebabkan semakin sedikit limbah yang diimpor (centerforecotechnology, 2018).

Penelitian ini menjadi sangat menarik untuk diteliti, khususnya mengenai peran Pemerintah Tiongkok dalam menggagas, merumuskan, dan mengimplementasikan kebijakan *National Sword China* di mana impor limbah bahan baku yang dilakukan sebenarnya dapat menguntungkan dan meningkatkan perekonomian negara Tiongkok itu sendiri.

Penelitian terdahulu menganalisis ancaman dari kebijakan *National Sword* yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok terhadap impor bahan daur ulang dengan menjelaskan dampaknya terhadap berbagai negara yang berada di Asia Tenggara, salah satunya ialah Indonesia. Selain itu, penelitian terdahulu juga menjelaskan tentang aspek hukum yang terdapat dalam undang - undang mengenai impor bahan daur ulang (Prasetiawan, 2019). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Mike Ritchie (2018) menjelaskan mengenai dampak dari kebijakan *National Sword* Tiongkok terhadap dampak daur ulang di Australia. Avery Trufelman (2019) menjelaskan mengenai keberlangsungan kebijakan *National Sword* seperti adanya pelarangan jenis bahan daur ulang serta permasalahan limbah bahan baku yang berujung pada pembentukan kebijakan pelarangan impor tersebut. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian sebelumnya tidak menjelaskan sebab – sebab pemerintah meregulasi pelarangan impor limbah bahan baku daur ulang dengan menggunakan perspektif *human security* yang peneliti lakukan. Di mana kebijakan ini kebijakan dalam mengatasi permasalahan limbah sehingga dengan penggunaan konsep *human security* dapat menganalisis permasalahan melalui ancaman yang berkaitan pada manusia dengan berbagai macam komponen yang ada yaitu *environmental security*, *health security* dan *political security*. Penelitian ini akan secara spesifik

menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Tiongkok melakukan pelarangan impor limbah bahan baku daur ulang.

1.2 Rumusan Masalah

Riset ini berupaya untuk menjawab sebuah pertanyaan kunci: **Mengapa Pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan *National Sword***? Berdasarkan pertanyaan di atas, penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan yang lebih spesifik:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan Pemerintah Tiongkok menggagas kebijakan *National Sword*?
2. Bagaimana konsep *human security* berperan dalam pembuatan kebijakan *National Sword* oleh Pemerintah Tiongkok?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan riset terbagi jadi dua, yakni tujuan umum dan khusus yang akan dijabarkan di bawah ini.

1.3.1 Tujuan Umum

Riset ini guna mengetahui aspek *human security* dalam pembuatan kebijakan lingkungan di suatu negara.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan keberjalanan undang - undang pemerintah dalam menangani impor limbah bahan baku.

2. Menjelaskan pemerintah dalam menanggapi kasus impor limbah bahan baku.
3. Menganalisis penyebab pemerintah dalam melakukan pelarangan impor limbah bahan baku.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat riset ini ada jenis yakni manfaat teoritis dan praktis, yang akan dijabarkan penulis berikut ini;

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan membawa sumbangsih akademis untuk memberikan cara pandang baru dalam melihat keberjalanan mengenai impor di dalam hubungan internasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap adanya kesadaran beberapa negara dalam melihat Tiongkok mengatasi impor limbah bahan baku sebuah negara.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 *Human Security*

Pada awalnya terbentuk konsepsi keamanan, dimensi keamanan dalam Hubungan Internasional berfokus pada keamanan negara, khususnya selama pasca Perang Dingin, dengan adanya berbagai upaya dalam melakukan perluasan keamanan dengan menggunakan isu militer, politik, ekologi, ekonomi dan sosial (Singh & Nunes, 2016, p. 2). Kemudian menjadi perdebatan bahwa para ahli teori meninjau tidak hanya keamanan suatu negara namun keamanan individu

merupakan sesuai yang penting bahkan negara bisa saja mengancam keamanan individu (IISAUC, 2020). Hal ini menjadikan keamanan dalam studi HI mulai berkembang, sejak masuknya pemikiran baru yang mendominasi studi keamanan di masa sekarang.

Perspektif keamanan mengalami pergeseran pasca perang dingin yang mana pergeseran ini kemudian berubah dari perspektif tradisional menuju persepektif non – tradisional yang berfokus pada keamanan manusia dari *the origin of threats* anggapan ancaman pada keamanan tradisional datang dari negara asing, lalu bila dari non tradisional bahwa ancaman datang dari lingkungan domestik ataupun internasional. Kemudian terdapat *the nature of threats*, keamanan nasional meninjau ancaman selalu sifatnya militer sedangkan non tradisional melihat bahwa perkembangan domestic maupun internasional sudah menggantikan sifat ancaman jadi lebih kompleks serta rumit maka menyebabkan persoalan keamanan jadi lebih komprehensif karena berkaitan dengan berbagai unsur misalnya lingkungan, sosial budaya, ekonomi serta isu seperti demokrasi, HAM, terorisme dan lainnya yang menyakut ancaman keamanan diakibatkan karena ada tahapan interaksi antar aktor negara dan non – negara.

Tabel 1.1 Perbedaan perspektif tradisional dan perspektif non – tradisional dalam konteks *human security*:

Dimensi	Tradisional	Non – Tradisional
(1)	(2)	(3)
<i>The origin of threats</i>	Negara rival	Negara dan non negara ialah domestik dan transnasional
<i>The nature of threats</i>	Kapabilitas Militer	Non militer ialah penyakit menular, terorisme, narkoba, ekonomi domestik, lingkungan hidup dan penggunaan teknologi informasi
<i>Responses</i>	Militer	Non militer ialah demokratisasi, liberalisasi ekonomi serta HAM
<i>Changing responsibility of security</i>	Negara	Negara, organisasi atau institusi internasional, individu
<i>Core values of security</i>	Kemerdekaan nasional, integritas teritorial, kedaulatan	Kesejahteraan ekonomi, HAM, perlindungan pada lingkungan hidup

Sumber: (Perwira, 2008, p. 14)

Hal ini menjelaskan bahwa keamanan tidak lagi berfokus pada hubungan antar negara (*interstate*) akan tetapi juga pada keamanan pada individu (Floyd & Matthew, 2013, p. 103). Pakar yang mengembangkan konsep *human security* yaitu Barry Buzan, pada bukunya berjudul *People, States and Fear*. Barry Buzan merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam pengembangan konsep keamanan. Buzan menjelaskan bahwa individu tidak bisa menjadi objek rujukan dalam menganalisis keamanan internasional akan tetapi negara, dikarenakan negara mempunyai peran penting dalam masalah keamanan internasional karena negara

merupakan agen utama dan negara merupakan aktor dominan didalam politik internasional. Dalam isu keamanan, Buzan membuat kriteria keamanan terbagi jadi lima (5), yakni militer, sosial, politik, ekonomi dan lingkungan yang mana di tiap dimensi terdapat nilai, ancaman serta karakteristik yang beda (Wæver, Buzan, Kelstrup, & Lemaitre, 1993, p. 24).

Pada buku berjudul *Security: A New Framework for Analysis*, Buzan, Waever, dan Wilde menerangkan terkait studi keamanan tidak hanya bersangkutan tentang negara dan militer tetapi bersangkutan pula dengan politik ekonomi, sosial serta lingkungan. Ketiganya juga mengungkapkan ada tiga (3) tahap proses sekuritisasi suatu isu yakni: (1) tahap non – politis, dimana isu tersebut jadi bagian dari diskusi masyarakat dan belum jadi pembahasan oleh pemerintah; (2) Tahap politis, dimana isu ini menjadi perbincangan, perundingan hingga perdebatan di pemerintahan; (3) Tahap tersekuritisasi, yaitu tahap dimana isu ini sudah tersekuritisasi saat aktor negara atau non negara bersepakat adanya ancaman dan membutuhkan *emergency measure* dalam menanggulangi ancaman itu (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998, pp. 23-24). Para aktor sekuritisasi bisa memakai *speech act* teruntuk alat mengontruksi isu menjadi sebuah ancaman dikarenakan *speech act* sangatlah penting untuk menentukan apakah proses sekuritisasi berhasil atau gagal (Trihartono, Suyani, & Nisya, 2020, p. 5).

Isu keamanan non tradisional dalam *human security* mendorong UNDP untuk merumuskan konsep *human security* pada tahun 1994. Konsep *Human Security* atau keamanan manusia ini sebenarnya telah berkembang menjadi isu penting dalam hubungan Internasional pada tahun 1990-an saat suatu kelompok pakar disebut dengan *The Copenhagen School* seperti Ole Weaver, Barry Buzan serta Jaap de

Wilde mulai mencantumkan unsur - unsur kajian studi keamanan seperti persoalan kerentanan sektor pangan, bencana alam, penyakit, perdagangan manusia, lingkungan hidup, terorisme, kesehatan, kemiskinan, narkoba, HAM dan lainnya (Hadiwinata, 2007, p. 13).

Pada tahun 1990, Negara – negara menyadari bahwa mereka perlu adanya pendekatan baru, tidak hanya berfokus pada militer, akan tetapi mengenai individu dari kekerasan sosial, ekonomi dan lingkungan (MacFarlane & Khong, 2006, p. 114). Kemudian Mahbub Ul Haq yaitu seorang ahli teori pembangunan internasional menekankan pentingnya konsep keamanan manusia dengan merumuskan kedalam *Human Development Report* (HDR). Tujuan laporan tersebut adalah membahas mengenai perkembangan manusia secara internasional di setiap negara. Laporan tersebut juga mengusulkan pembuatan *The Human Development Index* (HDI) untuk mengukur perbandingan menyangkut pendidikan, harapan hidup serta standar hidup di setiap negara. (UNDP, 1994, pp. 1-136).

Konsep yang merupakan bagian dari konstruktivisme ini mencoba membuat konsep keamanan berpusat pada keamanan negara yang kemudian bergeser pada keamanan individu (Buzan, Weaver, & Wilde, 1998, p. 50). Hasil pemikiran *human security* yang kuat ialah suatu respon mengenai persoalan kemanusiaan yang ada masa ini. Ada beberapa pemahaman umum dalam memandu penerapan pendekatan *Human Security* pada sistem Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yaitu: (1) Hak orang untuk hidup dalam kebebasan serta martabat bebas dari kemiskinan dan keputusasaan, (2) berorientasi dalam pencegahan yang bisa menguatkan pemberdayaan dan perlindungan seluruh orang dan semua komunitas, (3) Keamanan manusia mengakui keterkaitan diantara perdamaian, pembangunan dan

HAM, dan sama-sama memperhatikan hak-hak sipil, ekonomi, sosial, politik dan budaya, (4) Ada perbedaan gagasan keamanan manusia dari tanggung jawab untuk melindungi dan pengaplikasiannya, (5) Keamanan manusia tidak membutuhkan ancaman atau pemakaian kekuatan atau tindakan pemaksaan, dan (6) Keamanan manusia didasarkan pada kepemilikan nasional (un.org, 2016, p. 6).

Pada tahun 1993, HDR mulai meningkatkan kebutuhan dari konsep keamanan yang jauh lebih besar dalam keamanan masyarakat dari keamanan melalui persenjataan hingga keamanan melalui pembangunan manusia, dari keamanan teritorial hingga keamanan pangan, lingkungan dan pekerjaan (UNDP, 1993, p. 2). Salah hal inti dalam HDR selanjutnya adalah dorongan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dalam proses perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahun 1994, konsep *human security* diperkenalkan oleh UNDP. *United Nations Development Program* (UNDP) merupakan lembaga internasional yang memiliki pandangan mengenai konsep *human security* dengan fokus pada permasalahan kemanusiaan yang berbeda – beda, di mana konsep human security pada laporan UNDP terdapat dua (2) unsur penting, yakni; (1) rasa aman dari adanya ancaman bahaya kronis seperti kekurangan gizi, penyakit, kelaparan dan represi. (2) perlindungan dari gangguan kekacauan yang tidak diduga dan menyakitkan pada kehidupan sehari – hari, seperti dirumah, tempat kerja ataupun kalangan komunitas. (UNDP,1994, p. 23).

UNDP kemudian membuat tujuh (7) komponen di dalam *human security* yang pemenuhannya wajib menjadi tanggung jawab pemerintah yang harus mendapatkan perhatian tiap negara. 7 komponen itu yakni;

- 1) *Economic security*: yaitu upaya untuk memenuhi kebutuhan baik bagi individu maupun masyarakat dalam bidang ekonomi. Seiring dengan adanya pengaruh globalisasi maupun teknologi yang menghasilkan pola hubungan ekonomi yang bermacam – macam yang dapat mengancam bagi negara, masyarakat maupun individu dalam memperoleh atau mendapatkan akses sumber daya ekonominya. Seperti, bebas dari kemiskinan, jaminan pemenuhan kebutuhan hidup, akses ke pendapatan atau pekerjaan, gaji dan kondisi yang adi dan layanan.
- 2) *Food security* atau keamanan pangan yang diartikan bahwa setiap negara dapat mengatasi persoalan dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya, dengan ketersediaan yang cukup, didapatkan dimana saja, harga yang murah dan mudah memperoleh, seperti kemudahan akses terhadap kebutuhan pangan.
- 3) *Health security* yaitu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan baik individu maupun masyarakat, dengan adanya pencegahan yang dilakukan dapat menyebabkan kondisi yang bebas dari ancaman penyakit yang menular. Seperti, kemudahan mendapatkan layanan kesehatan dan proteksi /pencegahan dari penyakit, nutrisi dan air bersih.
- 4) *Environmental security*: yaitu keamanan publik dari adanya bahaya lingkungan yang diakibatkan proses alamiah maupun buatan akibat kecelakaan maupun kesengajaan yang berasal dari domestic maupun luar negeri. Hal ini diperlukan bagaimana pemerintah berperan dalam mengatasi permasalahan lingkungan negaranya, sehingga tercapainya lingkungan yang baik bagi masyarakatnya. Seperti, proteksi dari polusi udara dan pencemaran lingkungan, serta akses terhadap air dan udara bersih.

- 5) *Personal security* berkaitan dengan adanya upaya individu dalam memperoleh perlindungan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dikarenakan individu merupakan objek perlindungan negara paling kecil, sehingga pentingnya hak – hak dasar dan kebebasan bagi setiap manusia. Seperti, keselamatan dari ancaman fisik yang diakibatkan oleh perang, kekerasan domestik, kriminalitas, penggunaan obat-obatan terlarang, dan bahkan kecelakaan lalu lintas.
- 6) *Community security* adalah bagian dari konsep human security yang berfokus untuk memastikan bahwa komunitas dan anggotanya terbebas dari rasa takut seperti keselamatan masyarakat dan keamanan warga. Sehingga dengan menekankan aspek ini, dapat berupaya merangkul budaya dan konteks yang berorientasi individu serta budaya dan konteks yang berorientasi kelompok. Seperti, kelestarian identitas kultural dan tradisi budaya.
- 7) *Political security* merupakan sesuatu keamanan yang didapat dari ancaman terhadap legitimasi atau pengakuan unit politik atau pola yang diperlukan dalam kelembagaan. Pada dasarnya, keamanan politik bersangkutan dengan keberlangsungan hidup, bagaimana individu mendapatkan perlindungan dari negara yang melakukan represi politik, perlakuan buruk dan penghilangan, perlindungan pada HAM dan kebebasan dari adanya tekanan politik. Hal ini kemudian membuat tujuh komponen dalam *Human Security* bisa disederhanakan jadi 2 komponen dasar, yakni *freedom from fear* (bebas dari rasa takut) serta *freedom from want* (bebas dari ketidakmampuan untuk mempunyai).

Tiap ancaman punya banyak kaitan dan saling tumpang tindih, artinya konsep ini dapat membuat satu ancaman mengarah ke ancaman yang lain layaknya seperti domino. Seperti konflik kekerasan yang terjadi dapat menyebabkan konflik kemiskinan yang pada akhirnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup individu khususnya dalam kebutuhan pangan, pendidikan dan juga menyebabkan penularan penyakit (IISAUC, 2020).

Konsep *human security* yang dikembangkan Barry Buzan sering dijadikan sebagai rujukan dikarenakan keamanan merupakan salah satu fokus yang dominan didalam studi hubungan internasional. Dalam konsep tersebut, keamanan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan dan dicapai semua pihak, baik individu maupun negara. *Human Security* juga dapat dilihat sebagai pendorong multilateralisme yang efektif, prinsip ini didukung secara luas oleh Uni Eropa (Matlary, 2008, pp. 131–143). Artinya, perlu adanya kerja sama yang dilakukan oleh beberapa negara sehingga terciptanya keamanan bagi negara maupun individu.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan penjabaran kerangka pemikiran sebelumnya, argumen utama penulis yang bisa dipilih teruntuk menjawab rumusan permasalahan ialah akibat dari adanya kegiatan impor limbah bahan baku industri yang dilakukan akan memberikan dampak pada permasalahan ekologi Tiongkok dan dengan adanya bukti yang mendukung bahwa permasalahan ekologis akan berdampak pada permasalahan kesehatan yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit bagi masyarakat Tiongkok. Sehingga pemerintah Tiongkok mencoba fokus menghadapi permasalahan kemanusiaan yang terjadi.

1.7 Metodologi Penelitian

Pada riset ini, metodologi yang akan dipergunakan yakni metode penelitian kualitatif.

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Impor Limbah

Impor Limbah merupakan perdagangan antar negara dalam mengirimkan barang ataupun bahan bekas hasil dari kegiatan produksi baik dari hasil dari kegiatan manusia maupun dari alam. Impor Limbah dilakukan oleh negara untuk diolah lebih lanjut, dibuang ataupun di daur ulang. Pada dasarnya terdapat dua (2) jenis limbah yaitu; pertama, limbah yang tidak bisa diolah, limbah ini merupakan limbah yang berasal dari limbah dengan zat beracun yang terkontaminasi menyebabkan limbah tersebut dikatakan berbahaya yang bisa berdampak pada manusia. Kedua, limbah yang bisa diolah, hasil limbah ini yang kemudian diubah menjadi produk baru.

1.7.1.2 Bahan Baku

Bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam produksi utama pada pembuatan berbagai jenis barang. Bahan baku ini sering diperjual belikan di seluruh dunia oleh bursa komoditas. Pada dasarnya, bahan baku merupakan bagian dari faktor produksi, sehingga kebutuhan bahan baku sangat dibutuhkan di pasar internasional. Kebutuhan bahan dasar yang dibutuhkan oleh perusahaan terkait bahan baku dipergunakan untuk memproduksi barang yang kemudian diolah menjadi produk jadi di masa depan.

1.7.1.3 *National Sword*

National Sword merupakan hasil dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok dalam mengatasi permasalahan limbah yang semakin menumpuk akibat impor limbah yang dilakukan. Kebijakan ini bertujuan untuk melarang berbagai jenis limbah bahan baku industri dari berbagai Negara. Kebijakan ini berisi tentang pelarangan dengan 4 kategori dan 24 jenis limbah padat termasuk di dalamnya polietilentereftalat yang biasa digunakan dalam botol plastik, kertas yang tidak bisa disortir, limbah dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar, dan limbah tekstil.

1.7.2 Definisi Operasional

1.7.2.1 Impor Limbah

Impor Limbah merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Tiongkok untuk mencapai pertumbuhan ekonomi negaranya. Impor limbah yang dilakukan adalah jenis limbah yang bisa diolah yang kemudian diolah menjadi produk baru yang kemudian diekspor. Sehingga, semakin besar impor limbah yang dilakukan maka akan semakin besar maka akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Namun, setelah terbentuknya kebijakan *National Sword* yaitu melarang limbah masuk ke Tiongkok dengan 4 kategori dan 24 jenis limbah tertentu. Kegiatan impor limbah masih dilakukan, di mana Tiongkok masih menerima limbah dengan syarat tingkat kontaminasi limbah plastik tidak lebih dari 0,5 persen.

1.7.2.2 Bahan Baku

Adanya kebutuhan akan limbah bahan baku yang dibutuhkan Tiongkok untuk membuat produk baru bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Pemanfaatan limbah bahan baku yang diperlukan Tiongkok tersebut

didapatkan dari berbagai negara dari perusahaan – perusahaan yang berpusat di Amerika Serikat dan Eropa untuk diolah menjadi produk baru. Limbah bahan baku yang diimpor seperti, limbah kertas, kapas, wol , tekstil, dan plastik yang kemudian diolah menjadi produk baru yang kemudian di ekspor, sehingga dengan tingginya ekspor dilakukan maka dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Tiongkok.

1.7.2.3 *National Sword*

Kebijakan *National Sword* merupakan sebuah tindakan keras yang dilakukan Pemerintah Tiongkok dalam memerhatikan keamanan negaranya. Tujuan dikeluarkan kebijakan tersebut tidak lain sebagai salah satu tindakan keras akibat banyaknya limbah bahan baku industri yang masuk ke Tiongkok. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari *respon* Pemerintah Tiongkok dalam mengatasi permasalahan ekologis negara yang berdampak pada masyarakatnya sehingga dapat menciptakan rasa aman dari adanya ancaman terkait permasalahan ekologis yang terjadi di negara Tiongkok.

1.7.3 Teknik Pengambilan Data

Penelitian ini bersifat eksplanatif. Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi mengenai topik atau masalah yang belum dipecahkan sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjawab argumen utama peneliti. Penelitian eksplanatif mencoba “menghubungkan titik – titik penelitian” , dengan mengidentifikasi faktor penyebab dan hasil dari sebuah fenomena yang diteliti. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang serta rumusan permasalahan, riset ini teruntuk mendeskripsikan serta menjelaskan pemerintah mulai memikirkan aspek lingkungan dari dampak adanya impor yang dapat mengancam human security.

Jenis metodologi yang akan dipergunakan riset ini yakni kualitatif. Penelitian data kualitatif ialah data empiris (Patton, 1980). Pengambilan data pada penggunaan metode ini berdasarkan Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa terdapat beberapa teknik dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2000). Teknik tersebut berasal dari pengumpulan dan penyajian data yang penulis gunakan dari buku bacaan, informasi, jurnal ilmiah, e-book, dokumentasi media dan internet.

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka ialah sumber utama yang akan dipergunakan pada riset ini. Dikarenakan pengumpulan data dan teori yang relevan kemudian dapat membantu penulisan dalam permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.

1.1 Buku

Buku salah satu studi pustaka yang akan membantu penulis dalam mengumpulkan data dan fakta terkait permasalahan yang penulis angkat. Selain itu, melalui buku dapat terdapat teori – teori yang relevan sehingga penulis dapat menganalisa atas permasalahan yang terjadi.

1.2 Jurnal Ilmiah

Penulisan ini juga menggunakan jurnal ilmiah dari para ahli sehingga dapat memberikan data dari fakta yang relevan dengan permasalahan penelitian ilmiah ini.

1.3 Elektronik Book

e-book menjadi pedoman dalam penelitian penulis ilmiah ini terutama mengenai literatur luar karena tempat awal terjadinya permasalahan yang penulis angkat terdapat di luar wilayah Indonesia, yaitu Tiongkok. Selain itu, penggunaan e-book

digunakan sebagai pelengkap data jika melalui buku, data yang digunakan masih kurang lengkap.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yang digunakan penulis dalam penelitian ilmiah ini guna mendapatkan data mengenai permasalahan yang penulis angkat melalui dokumentasi data, fakta, dan berita. Dokumentasi yang digunakan adalah internet.

2.1 Internet

Melalui Internet, penulis dapat memperoleh informasi mengenai data dan kronologi kejadian mengenai studi kasus yang penulis teliti, sehingga internet sangat memudahkan penulis untuk mencari data yang diperoleh. Melalui internet, penulis dapat memperoleh informasi yang teraktual mengenai perkembangan respon pemerintah dalam penanganan impor limbah bahan baku.

2.2 Dokumentasi Media

Penulis akan menggunakan dokumentasi media baik media Internasional maupun lokal dalam mencari dan mengembangkan penelitian penulis.

Pada riset ini, berbagai pengumpulan data primer akan dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumentasi.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi empat (4) bab;

Bab 1: Bab ini berisi pendahuluan yang merupakan kerangka dari penelitian ini. Bab ini berisi Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Argumen Utama, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab 2: Bab ini menjelaskan beberapa aspek-aspek yang akan membantu dalam menganalisis di bab selanjutnya. Penulis mengawalinya dengan beberapa uraian dengan menjelaskan kebijakan dan dampak impor limbah serta asal muasal terbentuknya *National Sword China Policy*. Pada sub bab berikutnya penulis akan menjelaskan kesimpulan bab yang telah dibahas sebelumnya.

Bab 3: Bab ini berisi penjabaran dalam menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok, dalam hal ini tentunya akan digunakan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya. Analisis ini juga berdasarkan konsep *human security* dan diperkaya dengan data, sehingga analisis permasalahan yang terjadi dapat menjawab rumusan masalah.

Bab 4: Bab ini adalah bagian penutup, berisi kesimpulan dan saran dari peneliti lebih lanjut. Dalam bab ini, peneliti dapat menarik kesimpulan dengan menggabungkan argumen utama peneliti dan bukti empiris dalam membuktikan kebenaran argumen utama.